REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK NIGER
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Niger, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak";

Mempertimbangkan hubungan persahabatan antara Para Pihak dan masyarakat kedua negara;

Berhasrat untuk memperkuat hubungan persahabatan dengan memfasilitasi akses masuk bagi warga negara Republik Indonesia dan Republik Niger, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, ke dalam wilayah masing-masing Pihak untuk keperluan dinas;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Pihak;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Pembebasan Visa

1. Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah, yang tidak diakreditasikan di wilayah Pihak lainnya, dan melakukan perjalanan dalam kapasitas dinas, harus dibebaskan dari

persyaratan-persyaratan visa untuk masuk, singgah, tinggal, atau keluar dari wilayah Pihak lainnya untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari dari tanggal masuk.

2. Warga negara Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pada Pasal ini tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan dengan penghasilan yang memerlukan izin kerja berdasarkan peraturan nasional para Pihak.

Pasal 2

Visa bagi Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler atau organisasi internasional di wilayah Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari misi diplomatik atau konsuler Pihak lainnya sebelum masuk. Sebelum keberangkatan mereka, Kementerian Luar Negeri Negara Pengirim wajib memberitahukan ketibaan mereka kepada Kementerian Luar Negeri Negara Penerima

Pasal 3

Masa Berlaku Paspor

Warga negara salah satu Pihak yang ingin memasuki wilayah Pihak lainnya wajib memiliki paspor diplomatik atau dinas dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Persyaratan Masuk dan Keluar

Pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah dari salah satu Pihak yang dimaksud dalam Persetujuan ini, wajib masuk, singgah, atau keluar dari wilayah Pihak lainnya melalui pos-pos pemeriksaan internasional yang diberikan kewenangan untuk maksud tersebut oleh otoritas imigrasi berwenang, tanpa hambatan apapun, kecuali yang diatur dalam peraturan keamanan, migrasi, bea cukai, sanitasi, dan ketentuan lainnya yang dapat berlaku secara hukum bagi pemegang paspor yang sah tersebut.

Pasal 5
Kewenangan Otoritas

1. Masing-masing Pihak tetap memiliki hak untuk menolak masuk, mempersingkat masa tinggal atau mengakhiri masa tinggal dari warga negara Pihak lainnya yang berada di wilayahnya, apabila orang tersebut ternyata dianggap tidak dikehendaki atau memiliki kemungkinan untuk membahayakan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moralitas, keselamatan umum, atau keamanan nasional.
2. Warga negara dari salah satu Pihak wajib menaati hukum dan peraturan Pihak lainnya saat berada di wilayah Pihak lain tersebut, dan tidak boleh, dengan alasan Persetujuan ini, dibebaskan dari kewajiban mereka untuk menaati hukum domestik masing-masing.
3. Persetujuan ini tidak memengaruhi hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara terkait dengan keamanan dalam negeri dan terkait masuk, singgah, tinggal, atau pergerakan warga negara asing.

Pasal 6
Penangguhan

1. Salah satu Pihak dapat menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan atau sebagian dengan alasan ketertiban umum, keamanan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan nasional, atau bencana alam. Penangguhan ini wajib diberitahukan sebelumnya kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Prosedur yang sama berlaku pada saat pengakhiran penangguhan tersebut .
2. Penangguhan keseluruhan atau sebagian atas Persetujuan ini, tidak boleh memengaruhi warga negara Para Pihak yang memegang paspor diplomatik atau dinas yang sah yang telah diberikan persetujuan masuk dan telah berada di dalam wilayah Pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Persetujuan ini pada saat penangguhan berlaku.
3. Penangguhan akan berlaku segera setelah pemberitahuan diberikan oleh Pihak lainnya.

Article 7

Pertukaran Spesimen Paspor

1. Para Pihak wajib mempertukarkan spesimen dari paspor diplomatik dan dinas mereka, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau dinas yang baru, termasuk perubahan atas paspor yang berlaku, para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan dan mengirimkan spesimen tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum paspor tersebut diberlakukan.
3. Dalam hal warga negara salah satu Pihak mengalami kehilangan atau kerusakan paspor diplomatik atau dinas di wilayah Pihak lainnya, mereka wajib untuk segera memberitahukan otoritas berwenang Pihak penerima melalui misi diplomatik atau konsuler negaranya. Misi diplomatik atau konsuler dimaksud wajib menerbitkan kepada yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara, paspor baru atau dokumen perjalanan dan memberitahukan mengenai penerbitan tersebut kepada otoritas berwenang di Pihak penerima.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perbedaan atau perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan secara langsung antara para Pihak.

Pasal 9

Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat dengan kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis melalui saluran diplomatik. Perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir setelah Para Pihak saling memberitahukan mengenai selesainya prosedur internal yang diperlukan untuk tujuan ini dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini

Pasal 10

Pemberlakuan, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari Para Pihak yang saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan hukum internal untuk pemberlakuan Persetujuan ini sebagaimana diatur oleh peraturan nasional masing-masing telah terpenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya, akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama dan berturut-turut kecuali salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan ini.
3. Salah satu pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai maksud untuk mengakhiri Persetujuan ini secara tertulis melalui saluran diplomatik 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia

Retno L. P. Marsudi
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah
Republik Niger

Ibrahim Yacoubou
Menteri Luar Negeri, Kerja Sama, Integrasi Afrika, dan Warga Niger di Luar Negeri

REPUBLIK INDONESIA

ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'INDONESIE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER
RELATIF A
L'EXEMPTION DE VISA POUR LES DETENTEURS DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE

Le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République du Niger ci-après dénommés, collectivement les "Parties", et individuellement la "Partie";

Considérant les relations d'amitié existant entre les deux Parties et leurs peuples;

Désireux de renforcer leurs relations amicales en facilitant l'entrée aux ressortissants de la République d'Indonésie et aux ressortissants de la République du Niger détenteurs de passeports diplomatique ou de service dans les territoires des Parties respectives à des fins officielles;

Attachés aux lois et règlements en vigueur dans les Parties respectives;

Ont convenu de ce qui suit:

Article 1
Exemption de visa

1. Les ressortissants de chaque Partie, détenteurs de passeport diplomatique ou de service en cours de validité, et voyageant en leur capacité officielle, sont exemptés de l'obligation de visas d'entrée, de transit de séjour ou de

sortie dans le territoire de l'autre Partie pour une période n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date d'entrée.

2. Les ressortissants visés à l'alinéa 1 du présent Article ne sont pas autorisés à exercer un emploi payant pour lequel un permis de travail est requis par la législation nationale.

Article 2

Visa des Membres des Missions diplomatiques et consulaires

Les nationaux de chaque Partie, détenteurs de passeports diplomatique ou de service en cours de validité et envoyés comme membres de mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale dans le territoire de l'autre Partie, doivent obtenir avant leur départ, le visa d'entrée approprié auprès des Missions diplomatiques ou consulaires de l'autre Partie. Le Ministère des Affaires Étrangères de l'Etat d'envoi notifiera avant le départ, au Ministère de l'Etat d'Accueil, leur arrivée.

Article 3

Validité du passeport

Les ressortissants d'une Partie, désirant entrer dans le territoire de l'autre Partie, doivent être munis de Passeport diplomatique ou de service ayant une durée de validité d'au moins six (6) mois.

Article 4

Conditions d'Entrée et de Sortie

Les détenteurs de passeports diplomatique ou de service de chaque Partie visés dans le présent Accord doivent entrer,transiter ou sortir du territoire de l'autre Partie par les points internationaux autorisés par les autorités d'immigration compétentes, sans aucune restriction, à l'exception de celles prévues par les dispositions relatives à la sécurité, la migration, les douanes, la santé et autres qui leur restent applicables.

Article 5

Compétences des Autorités

1. Chaque Partie se réserve le droit de refuser l'entrée, d'écourter la durée ou de mettre fin au séjour de tout ressortissant de l'autre Partie dans son territoire, s'il considère que cette personne tend à être indésirable ou à mettre en danger l'ordre public, la santé publique, la moralité, la sûreté publique ou la sécurité nationale.
2. Les ressortissants de chaque Partie sont tenus d'observer les lois et règlements de l'autre Partie une fois dans le territoire de cette Partie , et ne doivent pas, en raison de cet Accord, être exemptés de leur obligation du respect du droit interne respectif.
3. Le Présent Accord n'affecte pas les lois et règlements des deux pays relatifs à la sécurité intérieure et à l'entrée, le transit, le séjour, ou le mouvement des étrangers.

Article 6

Suspension

1. Chaque Partie pourra suspendre la mise en œuvre de tout ou partie du présent accord, pour des raisons d'ordre public, de sûreté ou de santé publique, de sécurité intérieure ou de catastrophes naturelles. Cette suspension doit à l'avance être dûment notifiée à l'autre Partie par voie diplomatique. La même procédure s'appliquera lorsque la suspension est levée.
2. La suspension de tout ou partie du présent Accord n'affectera pas les ressortissants d'une Partie détenteurs de passeports diplomatique ou de service admis sous l'article 1 du présent Accord à entrer, et déjà présents sur le terrtoire de l'autre Partie, dans ce point de la suspension.
3. La suspension prend effet immédiatement après que notification a été faite à l'autre Partie.

Article 7
Échange des Specimens de Passeports

1. Les Parties précéderont par la voie diplomatique, à l'échange des spécimens de leurs passeports diplomatique et de service en vigueur, dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Accord.
2. En cas de mise en circulation de nouveaux passeports diplomatique ou de service, ou de modification de ceux existants, l'une et l'autre Parties s'informent par écrit, suivant les canaux diplomatiques, de tous changements, et se délivrent les spécimens au plus tard trente (30) jours avant leur introduction officielle.
3. En cas de perte par les ressortissants de chaque Partie ou de destruction de leurs passeports diplomatique ou de service dans le territoire de l'autre Partie, ils doivent immédiatement en informer les autorités compétentes de la Partie d'accueil à travers la mission diplomatique ou consulaire de leur pays de nationalité. La mission diplomatique ou consulaire concernée, établira aux personnes susmentionnées, en conformité avec la législation en vigueur dans leurs pays respectifs, un nouveau passeport ou tout autre document de voyage et en informe les autorités compétentes de la Partie d'accueil.

Article 8
Reglement des Différends

Tout différend ou litige relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord sera réglé à l'amiable à travers des consultations ou des négociations directes entre les Parties.

Article 9
Amendements

Le présent accord peut être amendé à tout moment, par consentement mutuel écrit des Parties, à travers le canal diplomatique. Lesdits amendements entreront en vigueur à la date de la notification par laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet, et constitueront une Partie intégrale de l'Accord initial.

Article 10

Entrée en vigueur, Durée et Extinction

1. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s'informent l'une et l'autre, par voie diplomatique, de l'accomplissement des formalités légales internes pour l'entrée en vigueur de cet Accord telles que prévues par leurs legislations nationales respectives.
2. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq (5) ans. Par la suite, il sera automatiquement renouvelé pour des périodes similaires successives, à moins que une Partie ne le dénonce.
3. Chaque Partie pourra notifier par écrit, à l'autre Partie, suivant le canal diplomatique, son intention de mettre fin à l'accord, trente (30) jours avant ladite terminaison.

En foi de quoi, les soussignés, ont signé le présent Accord.

Fait à Jakarta, le seize octobre deux mille dix-sept, en deux exemplaires originaux chacun, en Indonésien, Français, et Anglais, les deux textes étant également authentiques. En cas de divergence d'interprétation, le texte Anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie

Retno L. P. Marsudi
Ministre des Affaires Étrangères

Pour le Gouvernement de la République du Niger

Ibrahim Yacoubou
Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Nigériens à l'Exterieur

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NIGER
CONCERNING
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Niger, hereinafter collectively referred as the "Parties" and individually as the "Party";

Considering the friendly relations between the Parties and their peoples;

Desiring to strengthen their friendly relations by facilitating the entry of nationals of the Republic of Indonesia and the Republic of Niger, holders of diplomatic and service passports, into the territories of the respective Parties for official purposes;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective Parties;

Have agreed as follows:

Article 1
Visa Exemption

1. Nationals of each Party, holders of valid diplomatic or service passports, who are not accredited to the territory of the other Party, and are travelling in an official capacity, shall be exempted from visa requirements to enter, transit through, stay in or leave the territory of the other party for a period not exceeding 30 (thirty) days from the date of entry.

2. Nationals of the Parties mentioned in paragraph 1 of this Article shall not be permitted to undertake paid employment for which a work permit is required under the national legislation of the Parties.

Article 2

Visa for Members of Diplomatic and Consular Missions

Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic or service passports assigned as members of diplomatic or consular missions or international organizations in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the diplomatic or consular missions of the other Party prior to the entry. Prior to their departure, the Ministry of Foreign Affairs of the Sending State shall notify their arrival to the Ministry of Foreign Affairs of the Receiving State.

Article 3

Passport Validity

Nationals of one Party desiring to enter into the territory of the other Party shall be fitted with diplomatic or service passport with a period of validity of at least 6 (six) months.

Article 4

Entry and Exit Conditions

Holders of valid diplomatic or service passports of either Party referred to in this Agreement, shall enter into, transit, and depart from the territory of the other Party through international checkpoints authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restrictions, except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary, and other provisions which may be legally applicable to holders of such valid passports.

Article 5

Powers of the Authorities

1. Each Party reserves the rights to refuse admission of entry, shorten the duration or end the stay of any national of the other Party in its territory, if it

considers that person is found to be undesirable or likely to endanger public order, public health, morality, public safety or national security.

2. Nationals of either Party shall comply with the laws and regulations of the other Party whilst in that Party's territory, and shall not, by reason of this Agreement, be exempt from their obligation to comply with the respective domestic law.
3. This Agreement does not affect the applicable laws and/or regulations of the two countries relating to internal security and the entry, transit, stay or movement of foreigners.

Article 6

Suspension

1. Either Party may suspend the implementation of this Agreement either in whole or in part for the reasons of public order, public security, public health, national security or natural disasters. This suspension shall be duly notified in advance to the other Party through diplomatic channels. The same procedure shall apply when suspension comes to end.
2. The suspension of this Agreement in whole or in part, shall not affect nationals of a Party holding valid diplomatic or service passports who have been granted entry into and are already present in the territory of the other Party under Article 1 of this Agreement at the point of suspension.
3. The suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Party.

Article 7

Exchange of Passports Specimens

1. The Parties shall exchange the specimens of their valid diplomatic and service passports through diplomatic channel, within 30 (thirty) days following the signing of this Agreement.
2. In case of introduction of new diplomatic or service passports, as well as modifications of the existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes and deliver the specimen not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.

3. In case of nationals of either Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving Party through diplomatic or consular mission of the country of their nationality. The diplomatic or consular mission concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their respective countries, a new passport or travel document and inform such issuance to the competent authorities of the receiving Party.

Article 8

Settlement of Disputes

Any difference or dispute relating to the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or direct negotiations between the Parties.

Article 9

Amendments

This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels. Such amendments shall come into effect on the date of the last notification by which the Parties notify each other of the completion of internal procedures necessary for this purpose and shall constitute as an integral part of this Agreement.

Article 10

Entry into Force, Duration, and Termination

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the date of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all internal legal requirements for the entry into force of this Agreement as stipulated by their respective national legislation have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years. Thereinafter, it shall be automatically renewed for similar and successive periods unless terminated by either Party.

3. Either Party shall notify the other Party of its intention to terminate this Agreement in writing through diplomatic channel 30 (thirty) days prior to the intended date of termination.

In witness whereof, the undersigned, have signed this Agreement.

Done at Jakarta on the Sixteenth day of October in the year Two Thousand and Seventeen, in two originals, each in the Indonesian, French, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Indonesia

Retno L. P. Marsudi
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Niger

Ibrahim Yacoubou
Minister of Foreign Affairs, Cooperation, African Integration, and Niger Citizens Abroad